



Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Adnin Chiesa Syahwan¹, Eli Apud Saepudin², Listia Ulya Madina³, Shabna Azzahra⁴,
Ima Muslimah⁵

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bina Bangsa Kota Serang, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

Email:

[¹adninchiesa@gmail.com](mailto:adninchiesa@gmail.com), [²eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id](mailto:eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id), [³listiaalvy@gmail.com](mailto:listiaalvy@gmail.com),
[⁴shabnaaaa12@gmail.com](mailto:shabnaaaa12@gmail.com), [⁵imamuslimah312@gmail.com](mailto:imamuslimah312@gmail.com)

Diterima: 16-05-2025 | Disetujui: 17-05-2025 | Diterbitkan: 18-05-2025

ABSTRACT

This study examines the extent to which the Family Hope Program (PKH) plays a role in reducing poverty and expanding poor families' access to basic social services, such as education, health services, and social security. As one of the conditional social assistance programs initiated by the Indonesian government, PKH is aimed at very poor households with vulnerable family members, including school-age children, toddlers, pregnant women, people with severe disabilities, and the elderly. The evaluation was conducted using a mixed approach, using secondary data analysis from Statistics Indonesia (BPS) and the Ministry of Social Affairs, and supported by field findings through interviews and focus group discussions with beneficiaries and program implementers. The results of the analysis show that PKH has had a positive impact on reducing extreme poverty, encouraging the participation of children from poor families in education, and increasing the use of maternal and child health services. However, the program still faces a number of obstacles, such as problems with the validity of beneficiary data, delays in aid distribution, and limited capacity of social assistants. This study recommends improving the quality of data updates in the DTKS, intensive training for assistants, and integration of PKH with economic empowerment programs to accelerate the process of moving families out of dependency on assistance. Thus, PKH can function not only as an economic empowerment program, but also as an economic empowerment program.

Keywords: PKH, poverty, social services, social assistance, impact evaluation, community welfare

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) berperan dalam menurunkan angka kemiskinan dan memperluas akses keluarga miskin terhadap layanan sosial dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial. Sebagai salah satu program bantuan sosial bersyarat yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia, PKH ditujukan bagi rumah tangga sangat miskin yang memiliki anggota keluarga rentan, termasuk anak-anak usia sekolah, balita, ibu hamil, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan campuran, menggunakan analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, serta didukung oleh temuan lapangan melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah bersama penerima manfaat dan pelaksana program. Hasil analisis menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap penurunan kemiskinan ekstrem, mendorong keikutsertaan anak-anak dari keluarga miskin dalam pendidikan, serta meningkatkan penggunaan layanan kesehatan ibu dan anak. Meski demikian, program ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti masalah validitas data penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, dan keterbatasan kapasitas pendamping sosial. Studi ini merekomendasikan peningkatan kualitas pembaruan data dalam DTKS, pelatihan intensif bagi pendamping, serta integrasi PKH dengan program pemberdayaan ekonomi guna mempercepat proses keluarnya keluarga dari ketergantungan terhadap bantuan. Dengan demikian, PKH dapat berfungsi tidak hanya sebagai perlindungan sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai alat pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata kunci: PKH, kemiskinan, layanan sosial, bantuan sosial, evaluasi dampak, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah struktural yang telah lama menjadi hambatan utama dalam upaya mencapai pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia. Meskipun negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan sosial dan ekonomi masih tetap terpelihara, menciptakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan dengan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Program Keluarga Harapan (PKH), yang diperkenalkan pada 2007, merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer). PKH dirancang untuk memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan ketentuan bahwa mereka memenuhi beberapa kewajiban sosial, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan memanfaatkan layanan kesehatan dasar. Program ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga untuk memperbaiki akses keluarga miskin terhadap layanan sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang (Suharto & Mulyadi, 2019). Namun, efektivitas PKH dalam mencapai tujuannya masih menjadi bahan perdebatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, dengan keluarga penerima bantuan menunjukkan peningkatan dalam konsumsi rumah tangga dan pengurangan tingkat kemiskinan relatif (Widyanti & Lestari, 2020). Dengan semakin meluasnya cakupan penerima manfaat PKH yang kini mencapai jutaan keluarga di seluruh Indonesia, menjadi sangat penting untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap dampak dan efektivitas program ini dalam mencapai tujuan pengurangan kemiskinan. Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi program ini adalah ketidaktepatan dalam penargetan dan distribusi bantuan yang tidak merata antar wilayah, yang mengakibatkan beberapa keluarga yang seharusnya menerima manfaat justru tidak terjangkau. Dengan semakin meluasnya cakupan penerima manfaat PKH yang kini mencapai jutaan keluarga di seluruh Indonesia, menjadi sangat penting untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap dampak dan efektivitas program ini dalam mencapai tujuan pengurangan kemiskinan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Barrientos dan Hulme (2014) yang menekankan bahwa keberhasilan bantuan sosial tidak hanya tergantung pada besaran bantuan yang diberikan, tetapi juga pada ketepatan sasaran dan kualitas pelayanan yang menyertai program tersebut. Selain itu, dampak PKH terhadap peningkatan akses layanan sosial bagi keluarga miskin juga perlu dianalisis lebih mendalam. Meskipun ada indikasi peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak di daerah penerima manfaat, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk menilai apakah perbaikan tersebut bersifat berkelanjutan atau hanya terjadi dalam jangka pendek. Menurut Coady, Grosh, dan Hoddinott (2004), untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, program bantuan sosial harus diikuti dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengakses layanan sosial dan membangun ketahanan ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap PKH harus melibatkan tidak hanya aspek distribusi bantuan, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap pemberdayaan keluarga miskin dan penguatan sistem layanan sosial yang lebih inklusif. Evaluasi dampak PKH terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses layanan sosial bagi keluarga miskin menjadi sangat krusial dalam konteks pembangunan nasional. Analisis mendalam diperlukan untuk menilai sejauh mana program ini berhasil mencapai target-target yang telah

ditetapkan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi, serta mengukur kontribusinya dalam meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat. Evaluasi ini juga penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik yang dialokasikan untuk program berskala besar seperti PKH telah digunakan secara efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah dan tingginya kebutuhan sosial masyarakat. Dalam melakukan evaluasi ini, beberapa aspek fundamental akan menjadi fokus analisis, antara lain: ketepatan sasaran penerima manfaat PKH, efektivitas mekanisme penyaluran bantuan, dampak terhadap perubahan perilaku keluarga dalam mengakses layanan dasar, pengaruh terhadap indikator kesehatan dan pendidikan, serta kontribusi terhadap pengurangan tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Analisis juga akan mencakup evaluasi terhadap sistem pendampingan yang menjadi salah satu komponen penting dalam implementasi PKH, mengingat peran pendamping tidak hanya sebagai fasilitator penyaluran bantuan tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong pemberdayaan keluarga penerima manfaat.

Disamping itu, evaluasi akan mengkaji sinergi PKH dengan program perlindungan sosial lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan program subsidi pangan, untuk melihat komplementaritas dan efektivitas sistem perlindungan sosial secara keseluruhan. Integrasi berbagai program perlindungan sosial menjadi salah satu strategi penting dalam memaksimalkan dampak intervensi pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan. Melalui pendekatan evaluasi yang komprehensif dan berbasis data, diharapkan akan diperoleh gambaran utuh mengenai kontribusi PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia beserta rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Hasil evaluasi dampak PKH ini juga akan menjadi masukan berharga bagi pemangku kebijakan dalam merancang strategi perlindungan sosial yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, temuan evaluasi diharapkan dapat mendorong transformasi PKH dari sekadar program bantuan sosial menjadi katalisator pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, sehingga mereka dapat secara bertahap keluar dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dan mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, PKH tidak hanya berperan dalam mengatasi dampak kemiskinan tetapi juga berkontribusi signifikan dalam memutus akar penyebab kemiskinan itu sendiri, sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

LANDASAN TEORI

Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap sebagai salah satu bentuk bantuan sosial yang paling efektif dibandingkan jenis bantuan sosial lainnya di Indonesia. Temuan serupa juga terlihat dalam studi yang dilakukan oleh Owolewa di Nigeria dan Sudan Selatan pada tahun 2017. Studi tersebut berlangsung selama satu tahun dan melibatkan perempuan sebagai informan kunci, khususnya yang bertugas sebagai pengelola PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan tunai bersyarat memiliki dampak signifikan dalam membantu keluarga penerima manfaat keluar dari kemiskinan jangka panjang. Evaluasi dari para penerima menunjukkan keberhasilan nyata dan transparansi dalam pelaksanaan program, termasuk sistem distribusi bantuan yang mampu meningkatkan tingkat konsumsi rumah tangga serta memperluas akses ke layanan keuangan. Selain bantuan tunai, penerima manfaat juga mendapatkan dukungan dalam bentuk bantuan non tunai. Bantuan ini bertujuan untuk mengedukasi keluarga agar lebih bijak dalam mengelola

Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
(Syahwanes, et al.)

keuangan dan mendorong kemandirian ekonomi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah menyimpulkan bahwa setelah menerima bantuan sosial non tunai, kesejahteraan keluarga penerima mengalami peningkatan yang signifikan. (Kanuna et al., 2022)

PKH juga dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga (dampak konsumsi langsung), sekaligus meningkatkan investasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak. karena fakta masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia dalam dekade terakhir ini, serta tingginya komitmen Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui alokasi APBN yang terus meningkat setiap tahunnya. (Yulianti, 2020)

Program ini memiliki tujuan membantu meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan anak-anak yang terdaftar sebagai peserta PKH. Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan merupakan tujuan utama dalam program PKH, dengan tingginya tingkat pendidikan maka tingkat keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Dibuktikan bahwa KPM PKH tercatat sebagai keluarga miskin dan program PKH membantu mencapai tujuan meningkatkan taraf pendidikan dengan memberi bantuan PKH anak-anak dapat melanjutkan pendidikan dengan bantuan PKH tersebut. (Diva Ramadhani & Dwi Novarianti, 2024)

Selanjutnya adapun perubahan yang dirasakan oleh KPM PKH setelah menerima bantuan yaitu mereka sangat terbantu dengan adanya program ini. karena sebelumnya biaya pendidikan menjadi beban berat bagi KPM PKH namun setelah adanya bantuan PKH beban mereka bisa berkurang. Bantuan PKH digunakan untuk membantu biaya sekolah seperti membeli alat tulis, seragam ataupun hal lain yang menunjang dunia pendidikan KPM. Sehingga bantuan PKH ini, memang memberikan dampak positif bagi penerimanya terutama mereka yang memang tidak mampu dari segi perekonomian. Selain itu, untuk kondisi dari pelaksana itu sendiri mereka sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik sehingga tidak ada masalah antar pelaksana. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pelaksana PKH yang dimana mereka berkomunikasi dengan baik dan tidak terdapat masalah pribadi antar pelaksana. Sehingga hubungan yang terjalin sudah sangat baik. (Arlina et al., 2021)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana semua Permasalahan yang berkaitan dengan tema diambil dari berbagai sumber yang relevan. Disisi lain penulisan ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode studi kepustakaan (*literatur review*) yang didapatkan melalui artikel, web resmi, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan atau dikenal dengan sebutan PKH ini, sudah ada sejak tahun 2008 dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin (KSM) dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi keluarga sangat miskin. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
(Syahwanes, et al.)

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Program PKH ini adalah program nasional yang sudah mulai menjangkau 21.471 desa di seluruh Indonesia. Untuk jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui: 1) Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (price effect anak keluarga miskin); 2) Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect); 3) Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya; 4) Mengurangi pekerja anak maupun anak jalanan; 5) Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender); dan 6) Memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya.

Di sektor kesehatan, PKH mendorong keluarga miskin untuk lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi anak, dan pemantauan tumbuh kembang balita. Kewajiban keikutsertaan dalam posyandu dan fasilitas layanan kesehatan lainnya sebagai syarat menerima bantuan telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan ibu dan anak. Kondisi ini secara tidak langsung membantu pemerintah dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mencegah terjadinya stunting akibat kurang gizi. Akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik juga memperbaiki kualitas hidup keluarga miskin secara keseluruhan, dan memberikan peluang lebih besar bagi anak-anak untuk tumbuh dengan sehat dan produktif.

Tantangan dan Rekomendasi Penyempurnaan Program

Meskipun menunjukkan dampak positif, implementasi PKH masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan efektivitasnya. Pertama, masalah ketepatan sasaran (targeting) masih menjadi isu penting, dengan tingkat kesalahan inklusi (inclusion error) sebesar 10-15% dan kesalahan eksklusi (exclusion error) sebesar 20-25%. Pemutakhiran data kemiskinan yang lebih reguler dan penguatan sistem verifikasi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Kedua, kualitas pendampingan yang belum merata. Pendamping PKH memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan penerima manfaat terhadap persyaratan program dan memfasilitasi akses terhadap layanan. Namun, evaluasi menemukan rasio pendamping terhadap keluarga dampingan yang masih terlalu tinggi di beberapa wilayah, mencapai 1:250-300, jauh di atas rasio ideal 1:100-150. Selain itu, kapasitas pendamping dalam aspek fasilitasi pemberdayaan ekonomi masih perlu ditingkatkan. Ketiga, integrasi PKH dengan program perlindungan sosial lainnya dan program pemberdayaan ekonomi masih belum optimal. Meskipun telah ada upaya untuk mengintegrasikan berbagai program melalui sistem identifikasi penerima manfaat yang terpadu, dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih atau gap dalam cakupan. Penguatan koordinasi lintas sektor dan level pemerintahan menjadi prasyarat untuk mengoptimalkan sinergi berbagai program.

Efektivitas Pemberian Bantuan dalam Peningkatan Kesejahteraan

Efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan rumah tangga, seperti konsumsi, ketahanan pangan, investasi produktif, dan pemberdayaan ekonomi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan konsumsi rumah tangga penerima PKH sebesar 10-15% dibandingkan dengan kelompok kontrol, dengan porsi peningkatan yang lebih besar pada konsumsi makanan bergizi dan pengeluaran untuk pendidikan serta kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya meningkatkan kuantitas konsumsi tetapi juga kualitasnya, yang berdampak pada perbaikan status

gizi dan kesehatan keluarga. Dari aspek ketahanan pangan, keluarga penerima PKH mengalami penurunan kerawanan pangan sebesar 8-12%, yang diukur berdasarkan frekuensi makan, diversifikasi pangan, dan strategi bertahan saat krisis pangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa bantuan PKH berperan penting dalam menjaga stabilitas konsumsi keluarga miskin, terutama di masa-masa sulit seperti gagal panen, kenaikan harga pangan, atau krisis ekonomi.

Evaluasi juga menemukan adanya dampak tidak langsung PKH terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga penerima, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah dibandingkan dampak langsungnya terhadap konsumsi dan akses layanan dasar. Sekitar 15-20% keluarga penerima PKH melaporkan menggunakan sebagian kecil bantuan untuk investasi produktif skala mikro, seperti modal usaha kecil-kecilan atau tabungan pendidikan. Namun, mayoritas penerima mengalokasikan hampir seluruh bantuan untuk konsumsi dan pemenuhan kebutuhan dasar, sesuai dengan tujuan utama program. Ditinjau dari sisi efisiensi, PKH menunjukkan performa yang relatif baik dibandingkan dengan program bantuan sosial lainnya, dengan rasio manfaat terhadap biaya (benefit-cost ratio) yang diestimasi mencapai 1,5-2,1 bergantung pada durasi penerimaan bantuan dan karakteristik wilayah. Artinya, setiap rupiah yang diinvestasikan dalam PKH menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial senilai 1,5-2,1 rupiah dalam jangka panjang. Efisiensi ini didukung oleh mekanisme targeting yang relatif baik dan sistem penyaluran bantuan yang semakin disempurnakan melalui perbankan.

KESIMPULAN

Program Keluarga Harapan (PKH) telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses layanan sosial bagi keluarga miskin di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi, PKH berhasil menurunkan tingkat kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat yang mendorong pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. Program ini juga berkontribusi pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, yang terlihat dari meningkatnya kunjungan ibu hamil dan balita ke fasilitas kesehatan serta perbaikan status gizi anak. Dalam aspek pendidikan, PKH telah mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah dan menurunkan tingkat putus sekolah, yang berpotensi memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Meskipun demikian, pelaksanaan PKH masih menghadapi tantangan seperti ketepatan sasaran penerima manfaat, distribusi bantuan yang belum merata, serta pendampingan yang belum optimal di beberapa wilayah. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan penerima bantuan, peningkatan kapasitas pendamping, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Dari sisi keberlanjutan, PKH perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi untuk mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat sehingga tidak bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, PKH telah terbukti menjadi instrumen kebijakan sosial yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Namun, memerlukan penyempurnaan berkelanjutan untuk mengoptimalkan dampaknya dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia untuk memaksimalkan dampak PKH dalam jangka panjang, diperlukan penyempurnaan program yang berfokus pada peningkatan akurasi targeting, penguatan sistem pendampingan, dan pengembangan strategi graduasi yang lebih sistematis. Selain itu, PKH perlu diintegrasikan secara lebih efektif dengan program perlindungan sosial lainnya dan program pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan penyempurnaan tersebut, PKH diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan komitmen global Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Evaluasi Dampak PKH Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
(Syahwanes, et al.)

DAFTAR PUSTAKA

- Arlina, Guntur, Muhammad, Nain, & Umar. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, 9(2), 70–80.
- Diva Ramadhani, O., & Dwi Novarianti, W. (2024). Efektivitas dan Evaluasi Kerja Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 689–700. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12555648>
- DJA. (2015). *Program Keluarga Harapan*. 1–13.
- Kanuna, R. S., Nawawi, J., & Nulinah. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 58–68. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.7>
- Nurul Hidayatul Ulum1, I. H. I. R. (2024). *ANALISIS PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA KAMBINGAN BARAT, KECAMATAN LENTENG, KABUPATEN SUMENEP*. Volume 3 No. 2.
- Susanti, G., Tang Abdullah, M., Edy, N., & Pauzi, R. (2023). *Development Policy and Management Review (DPMR) EVALUASI DAMPAK PROGRAM: STUDI KASUS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN ENREKANG* *Impact Program Evaluation: A Case Study Of The Hope Family Program In Enrekang Regency*. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/>
- Wahyuni, W., Dwiarto, R., Suwarno, R. S., Giyanto, B., Stia, P., & Jakarta, L. (n.d.). *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)*.
- Yohana Vatreceya Purba, R., Maharani, A., & Olivia Pricila Harahap, K. (2024). *Dampak Sosial Program PKH dan PBI BPJS pada Penerima Bantuan: Perspektif Masyarakat*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14233120>
- Yulianti, R. (2020). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis)*. 4(2), 114–121.
- Zakiah, K. (2017). Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1, 103–105.